PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun 2015)

Oleh :
Desilia Tanzerina
Pembimbing : M. Rasuli dan Al Azhar L

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : desiliaerin@rocketmail.com

Effect Of Competence Of Human Resources (SDM) Regional Financial And Accounting System (SAKD) On The Effectiveness Of Financial Management Area With Effect Control System Government As Intern Moderating Variabels (Empirical Study On Regional Work Units Indragiri Hulu Riau Province in 2015)

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the influence of knowledge, the effectiveness of the tax system, the service tax authorities to corporate taxpayers in meeting their financial obligations to the consciousness as a moderating variable. The population that will be used in this research are corporate taxpayers listed in KPP Madya Pekanbaru. Determination of the sample in this study using convinience sampling is a generic term that includes a variety breadth of respondent selection procedures. The sample in this study are corporate taxpayers listed in KPP Madya Pekanbaru who were represented by staff accounting, tax administration staff, the administrative staff of financial, accounting manager, manager of finance and accounting and tax supervisor totaling 100 people. The data analysis used is multiple regression (multiple regression) assisted with SPSS Windows Ver 20. The results of this study prove that knowledge, the effectiveness of the tax system, the service tax authorities significant effect on the obligation to pay taxes, awareness moderate the relationship between knowledge of the obligation to pay the tax in KPP Madya Pekanbaru. While awareness is not moderate the relationship between the effectiveness of the tax system and the tax authorities of the obligation to pay service tax at KPP Madya Pekanbaru.

Keywords: Knowledge, Effectiveness, Tax, Awareness, and Paying Taxes.

PENDAHULUAN

Peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana PP No. 21 Tahun 2011 mendefinisikan

pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dimana untuk pengelolaan keuangan daerah ini berkaitan dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai,dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparansi dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai untuk mengakses informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti sudah diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2009:103).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan daerah (Lamusu,2013). Pengelolaan keuangan daerah yang ada pada suatu instansi harus ditata dengan sedemikian rupa agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan efektif. Efektivitas pengelolaan keuangan adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan Lampiran Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) atas laporan keuangan semester I tahun 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk tahun 2010 menunjukkan opini Tidak Wajar (TW) dan pada Tahun 2011-2014

mengalami perubahan yg sedikit meningkat yaitu dengan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dalam upaya pencapaian sistem pengelola keuangan daerah diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang memadai. Sistem pengendalian intern tersebut adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diharapkan mampu sebagai instrumen dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan suatu sistem yang dapat mewujudkan pelaksanaan efektivitas pengelolaan keuangan daerah tersebut yaitu Sistem Pegendalian Intern (SPI). Dimana sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Zalni , 2013).

Sistem pengendalian intern merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan suatu organisasi sektor publik. Masing-masing lembaga pemerintah sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang agar dapat meminimalkan risiko yang ada. Sistem pengendalian intern ini sangat diperlukan didalam pemerintahan agar terhindar dari kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak-pihak didalam sebuah instansi pemerintahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dari Simanungkalit (2013), tentang Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap efekitivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Gorontalo Peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah yang semakin baik maka akan dibarengi oleh efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Dengan kata lain sistem pengendalian intern akan turut meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan Anindita (2012), meneliti tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah kota Pekanbaru, dimana terdapat lemahnya sistem pengendalian intern. Banyaknya unsur-unsur SPIP yang tidak maksimal dilaksanakan sangat menentukan terhadap tidak berpengaruhnya SPIP terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012.

Selain sistem pengendalian intern pemerintah, dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan pula kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan suatu sistem yang baik pula.

Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah 1). Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu? 2) Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu? 3) Apakah Sistem Pengendalian Internal memoderasi hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu? 4 Apakah Sistem Pengendalian Internal memoderasi hubungan antara Sistem Keuangan daerah dengan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu?

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1). Untuk membuktikan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. 2). Untuk membuktikan pengaruh

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. 3). Untuk membuktikan pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. 4). Untuk membuktikan pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan dimana tercapainya tujuan dari organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Menurut Mardiasmo (2009:134) "efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan tersebut dikatakan telah berjalan efektif".

Pengertian efektivitas Mardiasmo (2007:134) dalam kamus besar akuntansi, mengemukakan bahwa efektivitas diartikan sebagai berikut "*effectivenes"* (efektivitas) adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya (aktual) sebanding dengan kinerja yang di targetkan.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah merupakan suatu sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, piñata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007:330).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan berhasil atau tidaknya suatu prestasi (keunggulan) yang dilakukan oleh organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih mengacu kepada keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pengertian Pengelolaan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan pengertian keuangan daerah adalah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah"

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

Jadi, efektifitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pemerintah dearah dalam mengelola keuangannya baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, penata-

usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu serta pengawasan dengan menggunakan tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya, dan tepat penggunaannya. Pemerintah daerah harus mengurus keuangan secara memadai, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Pemerintah daerah mengusahakan mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran untuk kemudian dibandingkan dengan rencana dan sasaran.

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang dan peraturan pemerintah menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan atas dasar pemikiran adanya keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan tersebut memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pada pemerintahan kabupaten Indragiri Hulu, peraturan yang mengatur masalah pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD tersebut hendaknya berpegang teguh pada beberapa prinsip yakni berpegang teguh pada disiplin APBD, tetap berpegang teguh pada kebijaksanaan anggaran, melaksanakan tertib anggaran, pelaksanaan anggaran yang terpola dan terarah.Untuk menjamin tertibnya pelaksanaan pengelolaan APBD diperlukan adanya laporan keuangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya

Kompetensi menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural merupakan seorang pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga

tugas tersebut dapat dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Mardiasmo, 2009:90).

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mecapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga.

Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2004: 146).

Komponen Pembentuk Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam suatu organisasi maupun instansi peerintah sumber daya manusia sangat diperlukan. Individu merupakan komponen utama yang menjadi pelaku dalam organisasi. Oleh karena itu, kemampuan organisasi tergantung dari kemampuan individu-individu yang bekerja dalam organisasi.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Darise (2008:41) sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian proses atau prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan menurut Hariyanto (2007: 10) yang dikutip oleh Sukmana dan Anggarsari (2009: 578).

Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud didalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, di susun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, prosedur akuntansi aset. (Halim, 2013; 84)**.**

Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut akuntansi pengertian demikian tidaklah tepat (Permadi, 2013:19).

Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Setiap organisasi tak terkecuali pemerintah memerlukan suatu alat pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Pengendalian intern diterapkan untuk

mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengendalian intern juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbunya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.

METODOLOGI PENELITIAN

penelitian ini dilakukan di Indragiri Hulu yang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau.

Populasi merupakan seluruh karakteristik yang menjadi objek penelitian, dimana karakteristik tersebut berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian bagi peneliti. Jumlah Populasi dalam penelitian 41 SKPD diantaranya terdapat Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Kecamatan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu.

Menurut Sugiyono (2002:116) dalam bukunya Metodologi Penelitian Bisnis menjelaskan tentang sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

jumlah sampel 27 SKPD. Dari setiap SKPD akan diambil 4 responden dengan yaitu Kepala SKPD, Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran. Sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 108 responden.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Pengumpulan data akan dilakukan melalui kuesioner yang diambil dari penelitian Siti Nurjannah (2014), Suci Deema Julita (2013), Friska (2014), Angga Dwi Permadi (2013). Kuesioner tersebut akan diberikan kepada responden yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu .

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_1 = Terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

H_2 = Terdapat pengaruh Sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

H_3 = Sistem Pengendalian Internal memoderasi hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

H_4 = Sistem Pengendalian Internal memoderasi hubungan antara sistem akuntasi keuangan daerah dengan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas menunjukkan hasil satistik deskriptif masing-masing instrumen dari sebanyak 95 responden yang diteliti. Untuk instrumen variabel sistem pengendalian internal pemerintah memiliki nilai minimum 45, nilai maksimum 75, nilai rata-rata 62,04 dan standar deviasi 9,02. Untuk instrumen variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai minimum 29, nilai maksimum 45, nilai rata-rata 37,97 dan standar deviasi 4,44. Untuk instrumen sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai minimum 28, nilai maksimum 44, nilai rata-rata 36,62 dan standar deviasi 4,27. Untuk instrumen efektivitas pengelolalan keuangan daerah memiliki nilai minimum 27, nilai maksimum 45, nilai rata-rata 37,27 dan standar deviasi 4,91.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH	95	45.00	75.00	62.0421	9.02233
SUMBER DAYA MANUSIA	95	29.00	45.00	37.9684	4.44219

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	95	28.00	44.00	36.6211	4.27058
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	95	27.00	45.00	37.2737	4.91295
Valid N (listwise)	95				

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor item instrument dengan skor total. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis *corrected item-total correlation*, suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Bila r hitung > r tabel, maka dinyatakan valid.
2) Bila r hitung < r tabel, maka dinyatakan tidak valid.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan	SPIP1	0.851	0.202	Valid
	SPIP2	0.803	0.202	Valid
	SPIP3	0.751	0.202	Valid
	SPIP4	0.769	0.202	Valid
	SPIP5	0.853	0.202	Valid
	SPIP6	0.803	0.202	Valid
	SPIP7	0.744	0.202	Valid
	SPIP8	0.758	0.202	Valid
	SPIP9	0.846	0.202	Valid
	SPIP10	0.802	0.202	Valid
	SPIP11	0.736	0.202	Valid
	SPIP12	0.767	0.202	Valid
	SPIP13	0.853	0.202	Valid
	SPIP14	0.801	0.202	Valid
	SPIP15	0.742	0.202	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia	SDM1	0.632	0.202	Valid
	SDM2	0.857	0.202	Valid
	SDM3	0.616	0.202	Valid
	SDM4	0.632	0.202	Valid
	SDM5	0.862	0.202	Valid
	SDM6	0.697	0.202	Valid
	SDM7	0.620	0.202	Valid
	SDM8	0.857	0.202	Valid
	SDM9	0.602	0.202	Valid
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	SAKD1	0.375	0.202	Valid
	SAKD2	0.542	0.202	Valid
	SAKD3	0.719	0.202	Valid
	SAKD4	0.361	0.202	Valid
	SAKD5	0.759	0.202	Valid
	SAKD6	0.241	0.202	Valid
	SAKD7	0.751	0.202	Valid
	SAKD8	0.745	0.202	Valid
	SAKD9	0.524	0.202	Valid
	SAKD10	0.399	0.202	Valid
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	EPKD1	0.689	0.202	Valid
	EPKD2	0.785	0.202	Valid
	EPKD3	0.715	0.202	Valid
	EPKD4	0.724	0.202	Valid
	EPKD5	0.763	0.202	Valid
	EPKD6	0.778	0.202	Valid
	EPKD7	0.684	0.202	Valid
	EPKD8	0.727	0.202	Valid
	EPKD9	0.759	0.202	Valid

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas adalah *cronbach alpha* dengan cara membandingkan nilai *alpha* dengan standarnya. Koefisien *cronbach alpha* yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrumen. Selain itu, yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*	Standar Reabilitas	Kesimpulan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan	0.966	0.6	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.915	0.6	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0.845	0.6	Reliabel
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.928	0.6	Reliabel

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Hasil Uji Normalitas

Dengan menggunakan *Normal P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Berikut hasil uji normalitas pada gambar 1.

Gambar 1
Normal Probability Plot

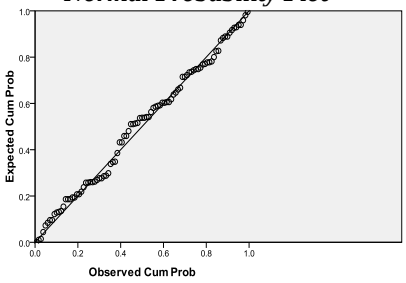

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Berdasarkan Gambar 1 di atas, terlihat data menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Jadi, dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukannya adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat dari nilai *torelance* dan nilai *Variance Inflasing factor* (VIF). Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah nilai besaran *Variance Inflation Faktor* (VIF) <10 dan *Tolerance* >0,10.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH	.666	1.502
	SUMBER DAYA MANUSIA	.609	1.641
	SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	.571	1.752

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Pada Tabel 4 dari hasil perhitungan analisis data di atas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan *tolerance* > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot* dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jika ada titik pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). *Scatterplot* pada penelitian ini terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

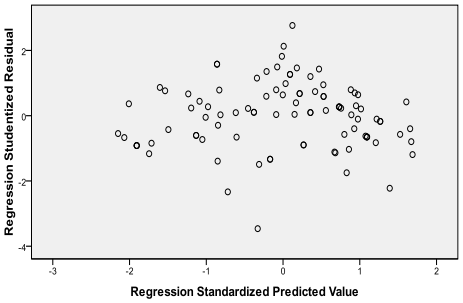

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Dari Gambar 2 di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0. Oleh karena itu dapat dikatakan model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Waston (DW), yaitu jika nilai DW terletak antara du dan (4 – dU) atau du ≤ DW ≤ (4 – dU), berarti bebas dari Autokorelasi. Jika nilai DW lebih kecil dari dL atau DW lebih besar dari (4 – dL) berarti terdapat

Autokorelasi. Nilai dL dan dU dapat dilihat pada tabel Durbin Waston, yaitu nilai dL ; dU = α ; n ; (k – 1). Keterangan : n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel, dan α adalah taraf signifikan.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.835[a]	.698	.688	2.74467	2.250

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson model adalah 2,250. Dari tabel Durbin Watson dengan α = 5% ; n = 95 ; (4 – 1) didapatkan nilai dU 1,732. Dari nilai tersebut diketahui bahwa 4-dU = 4-1,732 = 2,268. dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai Drubin Watson 2,250 lebih besar dari 1,732 dan lebih kecil dari 2,268. Artinya tidak terjadi masalah autokorelasi pada model yang dibangun.

HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.835[a]	.698	.688	2.74467	2.250

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Dari Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,698. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel sistem pengendalian internal pemerintan, kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 69,8%. Sedangkan sisanya 30,2% dipengaruhi oleh variabel lain yan tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

HASIL Uji Hipotesis

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Parsial Hipotesis Pertama

Variabel Independen	Beta	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)	.695	7.797	1.986	.000	H_a1 Diterima
R .629		R Square .395			
F 60.795		F Sig .000			

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Dari Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 7,797 dengan signifikansi 0,000 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan n – k – 1: alpha/ 2 = 95–1 – 1: 0,05/ 2= 93 : 0,025= ±1,986 dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa t_{hitung} (7,797) > t_{tabel} (1,986) dan Sig (0,000) < 0,05. Jadi dapat dikatakan $H_0$1 ditolak dan H_a1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Adanya koefisiensi β sebesar 0,695 menyatakan adanya pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia dalam pemerintahan daerah, maka berkemungkinan akan terjadi peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan sebaliknya jika kompetensi sumber daya manusia dalam pemerintahan daerah turun, maka efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan turun. Hal ini didasarkan pada pemikiran Sumber daya manusia merupakan salah

satu aset yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya akan mampu mengelola keuangan dengan lebih baik.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjanah (2014) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Suatu sistem dapat terlaksana dengan baik apabila sumber daya manusia dalam pemerintahan memiliki pengembangan yang berbasis kompeten sehingga dapat memberikan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan. Agar pengelolaan keuangan daerah menghasilkan LKPD yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia yang memahami serta berkompeten peme-rintahan. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Parsial Hipotesis kedua

Variabel Independen	Beta	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)	.782	8.928	1.986	.000	H_a2 Diterima
R .679		R Square .462			
F 79.712		F Sig .000			

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Dari table diatas nilai t_{hitung} sebesar 8,928 dengan signifikansi 0,000 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan n – k – 1: alpha/ 2 = 95–1 – 1: 0,05/ 2= 93 : 0,025= ±1,986 dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa t_{hitung} (8,928) > t_{tabel} (1,986) dan Sig (0,000) < 0,05. Jadi dapat dikatakan $H_0$2 ditolak dan H_a2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Adanya koefisiensi β sebesar 0,782 menyatakan adanya pengaruh positif sistem akuntansi keuangan daerah terhadap terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkatkan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud didalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Pradita (2010) tentang sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan

daerah maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik, sebaliknya Sistem akuntansi keuangan daerah yang buruk mengakibatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan buruk.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Tabel 9
Hasil Uji Regresi Parsial Hipotesis Ketiga

Variabel	Beta	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keputusan
(Constant)	-51.328	-3.005	±1.986	.003	H_a7 Diterima
Kompetensi Sumber Daya Manusia	1.887	4.001	±1.986	.000	
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1.194	4.354	±1.986	.000	
Moderat1	-.024	-3.233	±1.986	.002	
R = .828		R Square = .686			
F = 66.372		F Sig = .000			

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Dari tabel diatas nilai t_{hitung} sebesar –3,233 dengan signifikansi 0,002 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan n – k – 1: alpha/ 2 = 95–3 – 1: 0,05/ 2= 91 : 0,025= ±1,986 dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa t_{hitung} (–3,233) < $-t_{tabel}$ (–1,986) dan Sig (0,004) < 0,05. Jadi dapat dikatakan $H_0$3 ditolak dan H_a3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memoderasi hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan kecurangan dan penyelewengan yang mungkin ataupun telah dilakukan oleh berbagai pihak yang berkecimpung di dunia pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka pengujian atas sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sangatlah diperlukan. Dalam melaksanakan pengendalian intern ini, pihak-pihak yang berkaitan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Apabila sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan, maka keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi serta kepatuhan terhadap perundang-undangan bisa tercapai sehingga pengelolaan keuangan daerah akan terlaksana secara efektif. Dalam penelitian ini sistem pengendalian internal pemerintah dapat memperkuat dan memperlemah hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Apabila kompetensi sumber daya manusia tinggi maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik sebaliknya kompetensi sumber daya manusia yang buruk mengakibatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan buruk

Dalam penelitian ini sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderating dapat memperkuat dan memperlemah hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Apabila kompetensi sumber daya manusia tinggi maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik sebaliknya kompetensi sumber daya manusia yang buruk mengakibatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan buruk. Namun, apabila ditambahkan variabel pengendalian internal pemerintahan maka hubungan antara

kompetensi sumber daya manusia dengan efekivitas pengelolaan keuangan daerah dapat lebih kuat atau lebih lemah.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat (H_4)

Tabel 10
Hasil Uji Regresi Parsial Hipotesis kedelapan

Variabel	Beta	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keputusan
(Constant)	-49.491	-2.962	±1.986	.004	H_a8 Diterima
Sistem Akuntasi Keuangan Daerah	1.934	4.054	±1.986	.000	
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1.148	4.202	±1.986	.000	
Moderat2	-.024	-3.156	±1.986	.002	
R = .837	R Square = .701				
F = 71.105	F Sig = .000				

Sumber : *Data Olahan, 2016*

Dari Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar -3,156 dengan signifikansi 0,011 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan n – k – 1: alpha/ 2 = 95–3 – 1: 0,05/ 2= 91 : 0,025= ±1,986 dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa t_{hitung} (−3,156) < $-t_{tabel}$ (−1,986) dan Sig.(0,002) < 0,05. Jadi dapat dikatakan $H_0$4 ditolak dan H_a4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal memoderasi hubungan antara Sistem Keuangan daerah dengan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salah satu unsur penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem Pengendalian Intern, masing-masing lembaga pemerintah harus memiliki sistem pengendalian intern agar dapat meminimalkan risiko yang ada. Dalam pemerintahan sistem pengendalian intern sangat diperlukan agar terhindar dari kecurangan dan penyelewengan-penyelewengan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Jika pengendalian internal tersebut terimplementasikan dengan efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, asset milik Negara tetap aman dan peraturan perundang-undangan dijalankan maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan penelitian Saleba (2014), menemukan hasil penelitiannya bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Simanungkalit (2013), yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin baik sebaliknya semakin buruk sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin buruk

Dalam penelitian ini pengendalian internal pemerintahan sebagai variabel moderating dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengendalian internal pemerintahan sebagai variabel moderating dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik, sebaliknya Sistem akuntansi keuangan daerah yang buruk mengakibatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan buruk.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan penelitian adalah:

1) Hasil uji hipotesis menujnjukkan bahwa kompetensi sumber daya

manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

2) Hasil uji hipotesis menujnjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadapefektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
3) Hasil uji hipotesis menujnjukkan bahwa sistem pengendalian internal memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Indragiri Hulu
4) Hasil uji hipotesis menujnjukkan bahwa sistem pengendalian internal memoderasi hubungan antara sistem keuangan daerah dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Indragiri Hulu.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1) Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden.
2) Untuk penelitian selanjutnya agar ruang lingkup diperluas sehingga mungkin saja hasilnya berbeda.
3) Untuk penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel independen lainnya untuk melihat pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui bagaimana menciptakan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Darwanis, Desi Dwi Mahyani (2009). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi (Vol.2. No.2 Juli 2009 Hal. 133-151).

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.* Salemba Empat: Jakarta.

Juita, Suci Derma (2008). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusi, Komitmen Organisasi dan Komunikasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).* Jurnal. Universitas Negeri Padang. Padang

Lamusu, Lusiana (2013). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo.* Jurnal. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Permadi, Angga Dwi (2013). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)*. Skripsi.

Pradita, Gilang (2010). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.* Jurnal. Universitas Widyatama. Bandung. Hal:5.

Sugiyono. 2012.*Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Simanungkalit, Anggelina, A.P (2013). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Gorontalo)*.Skripsi.

Zalni, Fitri (2013). *Pengaruh Komitmen Karyawan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengelolaan Keuangan Derah (Studi Empiris pada DPKD Pemerintah Kota Sumatera Barat)*. Skripsi.